PERKEMBANGAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DARI MASA KE MASA

PROCEEDING

**INTERNATIONAL HUMANITARIAN
LAW COURSE 2019**

Malang, August 19-23, 2019

ICRC

ISBN 978-623-93897-0-3

Proceeding

International Humanitarian Law Course 2019

Perkembangan Hukum Humaniter Internasional Dari Masa ke Masa

Amartha Hills Hotel & Resort, Batu, Malang

19-23 Agustus 2019

Diterbitkan oleh:

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Malang

Bekerjasama dengan
International Committee of the Red Cross

Proceeding
International Humanitarian Law Course 2019
Perkembangan Hukum Humaniter Internasional Dari Masa ke Masa

Organizing Comitte

Ketua Pelaksana	: Najamuddin Khairur Rijal, M.Hub.Int
Wakil Ketua	: Ruli Inayah Ramadhoan, M.Si
Sekretaris	: Peggy Puspa Haffsari, M.Si, M.Sc
Bendahara	: Shannaz Mutiara Deniar, M.A
Koord. Acara	: Havidz Ageng Prakoso, M.A
Anggota	: Dewi Sekartaji
	: Siti Malikatul Mushowwiroh
Koord. Logistik	: Dedik Fitra Suhermanto, M.Hub.Int
Anggota	: Ahmad Mustofa
	: Rivani Tri Zonanda
Koord. Publikasi	: Dion Maulana Prasetya, M.Hub.Int
Anggota	: Andhika Bimantara
	: Syarifah Maulidiyah
Koord. Kesekretariatan	: Hamdan Nafiatur Rosyida, M.Si
	: Ikhrotul Fitriyah, S.IP
	: Siti Maisaroh

Sterring Comitte

Kushartoyo BS, S.H, M.H
M. Syaprin Zahidi, M.A
Dr. Dyah Estu Kurniawati, M.Si

Reviewer

Tonny Dian Effendi, M.Si
Gonda Yumitro, M.A
Devita Prinanda, M.Hub.Int

Editorial Board

Syasya Yuania Fadilah Mas'udi, M.SS

Demeiati Nur Kusumaningrum, M.A

Himawan Bayu Patriadi, Ph.D

Editor

Hafid Adim Pradana, M.A

Setting/Layout

Haryo Prasodjo, M.A

Publisher

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Malang

Editorial Staff

Jl. Raya Tlogomas No. 246

Telp. (0341) 460948, Fax. (0341) 460782

<http://hi.umm.ac.id/>

Email: info.hi.umm@gmail.com

1st Publication on October 2019

© 2019. All rights reserved.

DAFTAR ISI

Susunan Kepanitiaan	i
Kata Pengantar	iii
Ucapan Terima Kasih	iv
Paper	

1.	The Conundrum of ASEAN's Political Economic and "ASEAN Way" in Implementing IHL <i>Aditya Permana</i>	1-41
2.	Tren dan Diskursus tentang Operasi Perdamaian Internasional sebagai Implementasi dari Hukum Humaniter Internasional <i>Azhari Setiawan</i>	42-65
3.	Dinamika HAM dan Hukum Nasional di Indonesia <i>Christian Herman Johan de Fretes</i>	66-90
4.	Perlindungan Nelayan Indonesia Terhadap Militerisasi Nelayan Tiongkok dan Vietnam di Laut Tiongkok Selatan <i>Dhani Akbar</i>	91-115
5.	Kedudukan Terorisme Dalam Hukum Humaniter Internasional dan Penanggulangan Aksi Terorisme Dalam Hukum Nasional <i>Eka Martiana Wulansari</i>	116-163
6.	Tinjauan Konvensi Jenewa IV dan Protokol Tambahan II Terkait Perlindungan Simpatisan ISIS <i>Etha Pasan</i>	164-187
7.	Perlindungan Jurnalis dalam Konflik Bersenjata: Antara Utopia dan Realita <i>Faturachman Alputra Sudirman</i>	206-227

8.	Pelibatan Perempuan Dalam Proses Perdamaian Sebagai Upaya Mengurangi Dampak Konflik Bersenjata: Tinjauan Terhadap UNSCR 1325 (2000) <i>Frentika Wahyu Retnowatik</i>	208-227
9.	Tantangan Peran Aktor Negara dan Non-Negara dalam Intervensi Kemanusiaan <i>Jamaluddin Syakirin</i>	228-237
10.	Mistifikasi Diskursus Pemulangan WNI Eks Simpatizan ISIS <i>Julang Aryowiloto</i>	238-259
11.	Implementasi Hukum Humaniter Internasional dan Kaitannya Dengan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia <i>Meyland. S.F. Wambrau</i>	260-279
12.	Potret Dilema Implementasi Hukum Humaniter Internasional Dalam Film Shake Hands With The Devil <i>Nur Dina Camelia</i>	280-297
13.	Tinjauan Perlindungan Terhadap Relawan Kemanusiaan Dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional <i>Primadiana Yunita</i>	298-308
14.	Tinjauan Hukum Humaniter Terhadap Motif dan Keterlibatan Tentara Anak Dalam Konflik Sipil Bersenjata di Kolombia <i>Rendi Prayuda</i>	309-336
15.	Counterterrorism Amerika Serikat dan Pasukan Koalisi Melawan ISIS di Suriah dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional <i>Renitha Dwi Hapsari</i>	337-350
16.	Child Soldiers Case in Ituri, The Democratic Republic of Congo	351-373

	<i>Rina Shahriyani Shahrullah & Putri Andini</i>	
17.	#BlueForSudan: Social Media, Humanitarian Crisis, and Political Change in the Sudan Uprising (2018-2019) <i>Sahnaz Melasandy</i>	374-395
18.	Hukum Humaniter Internasional dan Kekerasan Berbasis Gender dalam Konflik Bersenjata : Studi Kasus Konflik Suriah <i>Shary Charlotte Pattipeilohy</i>	396-419
19.	Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Warga Sipil di Konflik Yaman <i>Fadhlan Nur Hakiem</i>	420-441
20.	Gender Divide: Stigmatisasi Dan Ostrasisme Eks Tentara Anak Perempuan Dalam Reintegrasi <i>Fitri Rofiyarti</i>	442-458
21.	Perlindungan Cagar Budaya dalam Hukum Humaniter: Sebuah Kajian terhadap Cagar Budaya Yang Berada Dalam Penguasaan Militer dan Dekat Dengan Instansi Militer <i>Sophia Listriani</i>	459-475
22.	Implementasi Hukum Humaniter Internasional Dalam Kasus Penculikan Jurnalis Jepang Jumpei Yasuda Tahun 2015 <i>Y. A. Wahyuddin & Diani Amadea Sanjaya</i>	476-493
23.	Perlindungan Terhadap Korban Perang dalam Penegakan Hukum Humaniter Internasional <i>Yunita Maya Putri, Rehulina Ria, & Wierma Putri</i>	494-505
24.	International Humanitarian Law and The New War on Act of Terrorism <i>Afandi Sitamala</i>	506-522

25.	Regional Biometrics Data Exchange Solution (RBDES) Sebagai Media Humanitarian Assistance: Tantangan dan Peluang Bagi Negara Anggota Bali Process <i>Masitoh Indriani & Amira Paripurna</i>	523-541
26	Perdagangan Manusia Dalam Tinjauan Hukum Humaniter Internasional <i>Rio Sundari</i>	542-554

Perlindungan Jurnalis dalam Konflik Bersenjata: Antara Utopia dan Realita

Faturachman Alputra Sudirman
(Universitas Haluoleo)

Abstract

The existence of International Humanitarian Law is an instrument for the protection of journalists covering armed conflict. But the high number of attacks and arrests portray the journalist profession as inherently dangerous. Journalists are not only at risk of being targeted by both government forces and non-government actors, which can cause them to be killed while covering the war. However, their role as controllers and witnesses of the ongoing war through word processing and images are considered capable of persuading the public because they present information directly from the scene. Thus, the high risk faced by journalists regarding their safety raises questions about how adequate the enforcement of the international humanitarian law framework is available for the protection of journalists. This article will further discuss the protection given to journalists within the framework of International Humanitarian Law, as well as the challenges faced by journalists in armed conflict.

Key Words: *International Humanitarian Law, Journalists, Armed Conflict, Protection*

Intisari

Keberadaan hukum humaniter internasional merupakan instrumen bagi perlindungan jurnalis yang meliput konflik bersenjata. Namun tingginya jumlah serangan, dan penangkapan menggambarkan profesi jurnalis pada dasarnya berbahaya. Jurnalis tidak hanya berisiko menjadi sasaran baik oleh pasukan pemerintah dan aktor-aktor non-pemerintah yang dapat menyebabkan mereka terbunuh ketika meliput perang. Di sisi lain peran

mereka sebagai pengontrol dan saksi dari berlangsungnya perang, melalui olahan kata, dan gambar dianggap mampu mepersuasi publik karena menghadirkan informasi langsung dari lokasi kejadian . Sehingga, tingginya risiko yang dihadapi wartawan terkait dengan keselamatan mereka memunculkan pertanyaan tentang seberapa memadainya penegakan kerangka hukum humaniter internasional yang tersedia bagi perlindungan jurnalis. Artikel ini lebih jauh akan membahas mengenai perlindungan yang diberikan kepada jurnalis dalam kerangka Hukum Humaniter Internasional, serta tantangan yang dihadapi jurnalis dalam konflik bersenjata.

Kata Kunci :*Hukum Humaniter Internasional, Jurnalis, konflik bersenjata, Perlindungan*

Latar Belakang

Pasca perang dingin jumlah konflik diberbagai negara dalam beberapa kurun waktu terakhir terus berkejolak, tidak hanya konflik antar negara, dan konflik sipil, namun juga konflik sipil dengan intervensi negara luar. Menurut Program Data Konflik Uppsala (UCDP), jumlah konflik bersenjata aktif meningkat dari 41 pada 2014 menjadi 50 pada 2015, sebagian besar disebabkan oleh ekspansi Negara Islam (IS) ke wilayah baru di 12 negara. Dari 50 konflik aktif, hanya satu yang bertarung di antara negara-negara (India-Pakistan). Sisanya konflik dalam negeri dan pemerintah terkait (19), teritori (29) atau keduanya (1). Namun, tingkat kekerasan yang terkait dengan konflik bersenjata masih jauh lebih rendah daripada saat perang dingin, sebagian karena komunitas internasional telah mengembangkan mekanisme yang lebih baik untuk menangani kekerasan (SIPRI, 2016).

Gejolak konflik bersenjata, perang yang melanda diberbagai belahan negara turut menghadirkan kerugian dan korban jiwa. Konflik bersenjata kontemporer cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan dan mempengaruhi lebih banyak warga sipil dalam hal korban daripada militer. Dalam 11 bulan pertama 2017 setidaknya 15.399 warga sipil tewas oleh senjata peledak, sebagian besar di kota-kota, yang merupakan

peningkatan 42 persen dibandingkan dengan 2016. Jumlah orang yang dipindahkan secara paksa di seluruh dunia pada akhir 2016 adalah 65,6 juta, dan jumlah korban ini terus berlanjut hingga 2017. Konflik bersenjata juga berkontribusi terhadap peningkatan kerawanan pangan pada tahun 2017. Yng melanda tujuh negara seperti Afghanistan, Republik Afrika Tengah (CAR), Lebanon, Somalia, Sudan Selatan, Suriah dan Yaman (SIPRI, 2018).

Banyaknya korban yang ditimbulkan oleh perang tentunya menyita perhatian masyarakat internasional apalagi korban yang tidak terlibat atau ikut serta secara langsung dalam peperangan, sehingga diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana pelaksanaan perang lebih manusiawi, baik dalam hal penggunaan alat dan penggunaan metode berperang. Maka, keberadaan Hukum humaniter internasional sebagai instrumen kebijakan dan sekaligus pedoman teknis yang dapat digunakan oleh semua aktor internasional untuk mengatasi isu yang berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan oleh perang seperti kerugian dan korban perang serta tata cara berperang. Hukum Humaniter berawal dari istilah Hukum Perang (Law of War), yang kemudian menjadi Hukum Sengketa Bersenjata (Law of Armed Conflict) dan sekarang dikenal sebagai Hukum Humaniter Internasional (Our World in Data, 2017).

Dibalik konflik bersenjata yang menyita perhatian internasional ada peran jurnalis yang turut memberitakan dan menyiarkan kepenjuru dunia mengenai konflik disuatu negara. Konflik dan media memiliki hubungan yang rumit dan saling menguntungkan. Jurnalis di wilayah konflik melaporkan konflik bersenjata dan melakukannya secara eksklusif. Selanjutnya, liputan berita tentang perang dapat berfungsi sebagai strategi propaganda yang efektif untuk memperoleh keunggulan kompetitif.

Di antara Hak Asasi Manusia yang paling penting kebebasan berekspresi dan informasi merupakan dasar demokrasi. Kekuatan media dalam mempengaruhi opini audiens, personel media sering terhalang untuk menjalankan peran pengawasan dan edukatif mereka. Tidak hanya sering terikat oleh peraturan dari lembaga media mereka sendiri, tetapi

juga oleh pedoman ketat dari pemerintah nasional mereka atau pemerintah negara tujuan.

Namun, terlepas dari peran dan tanggung jawab penting mereka terdapat resiko besar yang turut mengintai tugas mereka seperti wartawan yang menghilang, diancam, dan ditangkap saat peliputan. Bukan hanya hilangnya nyawa yang membuat pekerjaan jurnalis dalam konflik begitu berbahaya, tetapi juga serangan yang ditargetkan, penculikan, penangkapan bahkan tuduhan melakukan spionase. Komite untuk Perlindungan Jurnalis ('CPJ') melaporkan pada 2018 bahwa setidaknya 54 jurnalis terbunuh karena pekerjaan mereka yang sebagian besar terjadi selama konflik bersenjata di Timur Tengah (CPJ, 2019).

Gambar 1. Kawasan di mana jurnalis terbunuh

Sumber : CPJ 2018

Selain kekuatan pemerintah untuk mengendalikan media, penugasan wartawan dalam konflik bersenjata menjadi semakin berbahaya karena dua faktor lebih lanjut dan kontroversial: Pertama, semakin berkembang dan meningkatnya teknologi yang digunakan dalam perang dan Kedua, keinginan masyarakat yang tak pernah terpuaskan untuk diberi berita langsung dan *close-up* sepanjang waktu. Wartawan perang berada dalam situasi yang hampir mustahil di mana mereka harus mencoba untuk menyenangkan kepentingan yang berlawanan dari suatu

aktor di samping memenuhi tuntutan audiens, sambil berupaya untuk tetap aman dari serangan militer yang semakin canggih.

Menyadari peran penting jurnalis dalam konflik bersenjata, timbul pertanyaan apakah jurnalis juga menikmati perlindungan hukum yang memadai dari pekerjaan bahaya mereka ketika melaporkan suatu konflik bersenjata. Komite Internasional Palang Merah (ICRC) yang mendasarkan kerjanya pada ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional menyatakan bahwa jurnalis cukup dilindungi oleh Konvensi Jenewa (GC) dan Protokol Tambahan (AP) (ICRC, 2010).

Dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977 disebutkan bahwa jurnalis atau pers juga merupakan warga sipil yang berhak mendapatkan perlindungan. Namun aturan tersebut nampak telah dihiraukan dalam Konflik Suriah karena menurut data statistic Committee to Protect Journalist atau CPJ bahwa 85 jurnalis sudah menjadi korban dalam konflik bersenjata Suriah sejak tahun 2011. Salah satu peristiwa yang menjadi isu utama di seluruh dunia adalah eksekusi jurnalis Amerika yaitu James Foley.

Rezim hukum internasional utama yang mengatur perlindungan jurnalis di masa perang adalah sama dengan yang mengatur hukum konflik bersenjata secara umum, yaitu Hukum Humaniter Internasional ('IHL'). Meskipun IHL memberikan perlindungan bagi jurnalis, Namun tidak dapat dipungkiri banyaknya serangan terhadap jurnalis bahkan turut menghadirkan korban jiwa. Hal ini kemudian menimbulkan kesan bahwa realitasnya Perlindungan terhadap jurnalis dalam konflik bersenjata telah diatur dalam Hukum Humaniter Internasional, Namun disisi lain masih adanya jurnalis yang terbunuh dalam konflik bersenjata justru menegaskan kembali sejauh mana jurnalis dapat dilindungi oleh Hukum Humaniter Internasional. Artikel ini lebih lanjut akan membahas mengenai bagaimana perlindungan jurnalis menurut Hukum Humaniter Internasional, serta tantangan yang dihadapi oleh jurnalis dalam konflik bersenjata.

Memahami Jurnalis, Konflik Bersenjata, dan Hukum Humaniter Internasional

Memahami kegiatan jurnalis dalam menginformasikan konflik bersenjata, perlu untuk membedakan antara dua jenis jurnalisme yaitu jurnalis independen dan koresponden perang. Jurnalis independen disebut demikian karena mereka tidak secara resmi dikenai sanksi oleh militer atau pemerintah, dan beroperasi 'secara independen'. Mereka didefinisikan sebagai '[...] koresponden, reporter, fotografer, dan asisten teknis film, radio, dan televisi yang biasanya terlibat dalam aktivitas ini sebagai pekerjaan utama mereka [...]' (Draft UN Convention, 1975).

Sedangkan *Dictionnaire de droit international public* (2001) mendefinisikan Koresponden perang sebagai 'wartawan khusus yang hadir, dengan otorisasi dan di bawah perlindungan angkatan bersenjata dari seorang pasukan, di tempat operasi dan yang misinya adalah untuk memberikan informasi tentang peristiwa yang berkaitan dengan perang yang sedang berlangsung (Salmon, 2004). Definisi ini mirip dengan yang diadopsi dalam Resolusi 1738 Dewan Keamanan PBB (UNSC) dan juga disebutkan dalam Buku Hijau *British Armed Forces*, yang secara khusus menekankan perlunya akreditasi (PBB, 2006). Ini membedakan mereka dari jurnalis independen yang tidak secara resmi diotorisasi oleh pemerintah mereka dan tidak diakreditasi oleh militer. Ciri mencolok dari jenis Koresponden Perang adalah 'embedded' atau ikut serta dengan militer, sebuah istilah yang populer sejak awal perang Irak pada tahun 2003 tetapi sudah digunakan selama Perang Dunia I (Tuosto, 2008).

Berkenaan dengan meningkatnya kehadiran jurnalis di daerah konflik dan berkurangnya jarak mereka dalam bekerja dengan garis depan (front-line), dapat diasumsikan bahwa pelaporan perang menjadi semakin berbahaya. Dalam banyak konflik, tidak sedikit jurnalis telah ditahan, dilukai atau dibunuh karena fakta bahwa melindungi diri dari garis depan dalam suatu konflik sangat beresiko. Seperti yang ditunjukkan data statistik CPJ, bahwa sejak 1992-2018 sebanyak 1335 jurnalis telah terbunuh sejak 1992 baik dalam baku tembak atau dalam pertempuran,

Hal yang mengindikasikan peningkatan drastis di setiap tahun yang diakibatkan oleh konflik.

Perlindungan Jurnalis dalam Hukum Humaniter Internasional (IHL) hanya berlaku pada saat konflik bersenjata baik konflik bersenjata internasional (IAC) atau Konflik bersenjata non internasional (NIAC). Sedangkan dalam konflik internal suatu negara seperti kerusuhan, huru-hara, tindakan yang sporadis dan terisolir tidak termasuk dalam cakupan IHL, namun yang berlaku hukum HAM dan hukum nasionalnya. Jurnalis telah menjadi sasaran populer dalam kasus pembunuhan dan penyerangan fisik, karena intensitas informasi yang diberikan melalui kekuatan kata-kata dan gambar-gambar yang dihasilkan oleh jurnalis. Dalam konteks ini, juga menarik untuk dicatat terkait perlindungan jurnalis disituasi di luar dari konflik bersenjata bahwa menurut statistik CPJ, sejumlah besar kematian jurnalis juga disebabkan oleh pejabat pemerintah yang berusaha untuk menahan efek yang tidak menguntungkan dari kekuatan media. Seperti pemberontakan di Libya dan Mesir pada tahun 2011 misalnya menunjukkan bahwa para jurnalis nampak lebih rentan terhadap serangan fisik dan penahanan yang sudah ditargetkan. CPJ mencatat 160 serangan terhadap wartawan selama pemberontakan Mesir, 2 orang terbunuh dan 2 orang ditahan (CPJ, 2011), sedangkan sebanyak 101 kasus penyerangan terhadap jurnalis dan fasilitas mereka, dan 5 orang terbunuh selama revolusi Libya (CPJ, 2011).

Hukum humaniter merupakan salah satu sistem hukum yang dibuat untuk mengatur mengenai tata cara berperang dan perlindungan korban perang. Tujuan utama dari hukum humaniter yaitu memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita/menjadi korban perang, baik yang secara nyata/aktif turut serta dalam permusuhan (kombatan/combatant) maupun tidak turut serta dalam permusuhan (penduduk sipil/civilian population) (Sujatmoko, 2015).

Tonggak penting dalam perkembangan hukum humaniter salah satunya adalah didirikannya organisasi Palang Merah dan ditandatanganinya Konvensi Jenewa tahun 1864. Pada waktu yang hampir bersamaan di Amerika Serikat Presiden Lincoln meminta Lieber, seorang

pakar hukum imigran Jerman agar menyusun aturan berperang. Hasilnya, adalah *Instructions for Government of Armies of the United States* atau disebut *Lieber Code*, dipublikasikan pada tahun 1863. Kode Lieber ini memuat aturan-aturan rinci pada semua tahapan perang darat, tindakan perang yang benar, perlakuan terhadap penduduk sipil, perlakuan terhadap kelompok orang-orang tertentu seperti tawanan perang, yang luka dan sebagainya (Permanasari, 1999).

Pembentukan Konvensi Jenewa 1864, dalam sejarahnya, berkaitan dengan pembentukan Komite Internasional Palang Merah atau *International Committee of the Red Cross* (ICRC). Pembentukan Konvensi Jenewa 1864, sedikit banyak, dipengaruhi dari ide yang terpublikasi dari buku “A Memory of Solferino” yang ditulis oleh salah satu pendiri ICRC, yaitu Henry Dunant. Dalam buku tersebut, Henry Dunant menggambarkan pengalamannya menyaksikan penderitaan para tentara yang menjadi korban dan tidak pernah memperoleh pertolongan di medan bekas pertempuran di Solferino (Ambarwati et al, 2010).

Secara singkat, dapat dikatakan, Hukum Humaniter Internasional adalah aturan-aturan yang dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan kemanusiaan dan juga kepentingan militer. Dalam istilah yang lebih populer, dapat dikatakan bahwa Hukum Humaniter Internasional terbentuk dari percampuran antara seni perang dengan pertimbangan kemanusiaan (Ambarwati et al, 2010). Selain itu, tujuan pokok yang senada dari kaidah-kaidah hukum humaniter ini ialah untuk alasan-alasan perikemanusiaan guna mengurangi atau membatasi penderitaan- penderitaan individu, serta untuk membatasi aremana saja konflik bersenjata diizinkan. Karena alasan itulah, maka kadang-kadang disebut sebagai “hukum perang humaniter” atau kaidah-kaidah hukum “perang yang berperikemanusiaan”. Nama-nama yang pada saat ini diakui untuk kaidah-kaidah tersebut adalah “Hukum Humaniter Internasional” (Rudy, 2011).

Perlindungan Jurnalis dalam Hukum Humaniter Internasional

Prinsip perlindungan umum dan perlindungan jurnalis adalah bagian dari Hukum Humaniter Internasional (IHL), yang terdiri dari seperangkat aturan yang dirancang untuk mengatur perlakuan terhadap individu - militer sipil dalam konflik bersenjata. Dalam Hukum Humaniter Internasional pasal yang secara eksplisit merujuk pada perlindungan jurnalis dalam konflik bersenjata internasional adalah Pasal 79 Protokol Tambahan I, yang dimasukkan sebagai ketentuan khusus yang berkaitan dengan jurnalis di dalam Hukum Humaniter Internasional. Menetapkan bahwa jurnalis yang terlibat dalam misi profesional berbahaya di daerah konflik bersenjata, baik jurnalis independen atau koresponden perang yang menemani angkatan bersenjata, harus dianggap sebagai warga sipil dalam arti Pasal 50 (1) Protokol Tambahan I. Dengan demikian, serangan terhadap jurnalis sangat dilarang di bawah IHL.

Lebih lanjut, IHL menerapkan prinsip pembedaan (*distinction principle*) dan karenanya melindungi kombatan dan warga sipil secara berbeda. Ini penting ketika menganalisis perlindungan jurnalis yang akan diuraikan dalam lebih jauh. Jurnalis yang diakui sebagai warga sipil dalam konflik bersenjata juga termasuk dalam perlindungan Hukum Humaniter Internasional. Namun terdapat perbedaan yang fundamental antara koresponden perang dan jurnalis independen.

Perlindungan Koresponden Perang

"Koresponden perang" (*war correspondent*) didefinisikan sebagai yaitu "Orang-orang yang mengikuti angkatan bersenjata tanpa benar-benar menjadi anggotanya" (Konvensi Jenewa, 1949). Karena mereka bukan bagian dari angkatan bersenjata, namun mereka memiliki status sipil dan karenanya mendapat manfaat perlindungan yang sesuai (Konvensi Jenewa, 1949). Selain itu, dalam satu hal, terkait dengan upaya perang, koresponden perang mendapat manfaat dari status tahanan perang (*Prisoner of War*) jika mereka tertangkap musuh, asalkan mereka telah diberi otorisasi untuk menemani pasukan militer.

Status seorang koresponden perang dalam konflik bersenjata adalah termasuk seorang non-kombatan (sipil). Sama halnya dengan kru pesawat militer, kontraktor suplai, dan anggota pekerja yang bertugas

dalam peralatan perang angkatan bersenjata. Hal ini dikarenakan oleh keterikatan mereka terhadap personil militer dalam suatu konflik, Namun karena keterikatan tersebut, bukan berarti mereka turut andil secara aktif dalam suatu peperangan. Kelompok ini disebut sebagai non-kombatan sesuai dengan Konvensi Jenewa III Tahun 1949 ditujukan untuk memberikan status tawanan perang atau Prisoner of War (POW). Seorang jurnalis dapat disebut sebagai koresponden perang ketika mereka mempunyai kartu identitas untuk membuktikan kredibilitasnya. Koresponden perang mendapatkan perlakuan khusus karena statusnya yang non-kombatan dan dapat disamakan dengan sipil, namun apabila tertangkap mendapat status POW.

Maka, serangan terhadap jurnalis dan media yang memberitakan merupakan bentuk pelanggaran hukum, karena di bawah IHL, warga sipil dan objek sipil dilindungi. Dengan kata lain, jurnalis serta peralatan yang mereka gunakan tidak memiliki status khusus, mereka mendapat manfaat dari perlindungan umum seperti status yang diberikan kepada orang-orang sipil serta objek-objek yang dilindungi, kecuali ketika mereka turut serta yang mendukung aksi-aksi militer.

Perlindungan jurnalis yang terlibat dalam misi profesional berbahaya

Berkenaan dengan ancaman terpenting kedua bagi jurnalis dalam konflik bersenjata, penangkapan dan kemungkinan penahanan dalam konflik bersenjata, penting untuk dicatat bahwa Hak Asasi Manusia dapat melengkapi dan memperkuat IHL. Semua jenis jurnalis harus diperlakukan sebagai warga sipil seperti yang diatur dalam Konvensi Jenewa IV 1949 melalui Protokol Tambahan I 1977 pada pasal 50 paragraf I yang menyatakan bahwa jurnalis yang berada dalam misi profesional untuk meliput sebuah konflik bersenjata di daerah yang berbahaya dianggap sebagai orang sipil yang bebas dari serangan militer selama dia tidak melakukan tindakan yang membahayakan status sipilnya seperti aktif ikut dalam pertempuran.

Status pastinya tergantung pada kebangsaan dan tempat penangkapan mereka. Jika ditangkap oleh pihak berwenang di negara mereka sendiri, hukum internal serta hukum hak asasi manusia universal

berlaku. Wartawan yang merupakan warga negara dari negara yang tidak berperang berada di bawah perlindungan hubungan diplomatik antara kedua negara dan dilindungi oleh hukum masa damai, termasuk Hak Asasi Manusia (Mukherjee, 2013).

Wartawan yang ditangkap oleh pihak berwenang dari negara lain yang berperang, di samping penerapan Hak Asasi Manusia secara umum, juga mendapatkan jaminan mendasar yang diberikan oleh Pasal 75 Protokol Tambahan I, termasuk antara lain larangan kekerasan terhadap kehidupan, kesehatan atau fisik dan / atau kesejahteraan mental, kebiadaan terhadap martabat pribadi, penyanderaan, hukuman kolektif, ancaman dan penahanan serta pengadilan yang adil dan manusiawi. Adapun tindakan perlindungan jurnalis secara umum diatur dalam Pasal 79 pada Protokol Tambahan (Protokol Tambahan, 1977).

Secara keseluruhan, baik jurnalis independen maupun jurnalis yang terakreditasi tidak diberikan status khusus. Sebaliknya, jurnalis adalah warga sipil jika terjadi serangan dalam konflik bersenjata. Meskipun Hukum Humaniter Internasional tidak mendefinisikan jurnalis atau jenis-jenis jurnalis, Hukum Humaniter Internasional hanya membedakan antara koresponden perang dan jurnalis independen dalam kasus penangkapan.

Sementara jurnalis independen dianggap sebagai warga sipil dan diberikan perlindungan pada Pasal 75 Protokol Tambahan I, Pasal Umum Konvensi Jenewa III dan Konvensi Jenewa IV, koresponden perang (termasuk *embedded* jurnalis) secara khusus disebutkan dalam Konvensi Jenewa III dan dilindungi oleh status POW sebagai orang yang ikut serta dengan militer.

Perbedaan ini didasarkan pada status yang melekat pada peran jurnalis independen dan koresponden perang. Koresponden perang menemani militer dan diberi sanksi oleh pemerintah. Mereka umumnya lebih terekspos pada risiko dan ancaman karena memiliki akses ke garis depan dalam suatu konflik dan karena dikaitkan dengan 'war effort' (Gallois, 2013). Jurnalisindependen yang sering tidak memiliki sarana

untuk mencapai garis depan karena pembatasan akses serta kurangnya dukungan dianggap kurang terekspos pada ancaman secara langsung.

Perlindungan peralatan media sebagai objek sipil

Perlengkapan media seperti peralatan radio dan televisi adalah obyek sipil yang juga mendapatkan perlindungan. Larangan serangan terhadap benda-benda sipil dengan tegas ditetapkan dalam IHL pada awal abad ke-20 dan ditegaskan kembali dalam Protokol 1977 dan dalam Statuta Roma *International Criminal Court*.

Seperti halnya untuk "warga sipil," Protokol I mendefinisikan "objek sipil" secara gamblang: apa pun yang bukan merupakan tujuan militer dianggap sebagai objek sipil (Pasal 52 (1)). Paragraf 3 Pasal 52 melangkah lebih jauh dengan memberikan tiga contoh objek sipil, yaitu tempat ibadah, rumah, dan sekolah. Maka, peralatan dan fasilitas media yang tidak digunakan untuk keperluan militer dan yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 52 (2) termasuk dalam kategori objek sipil, yang "[...] tidak akan menjadi objek serangan atau pembalasan [...]" (Pasal 52 (1)).

Secara khusus, kewajiban ganda diatur dalam Pasal 48 Protokol I - untuk membedakan setiap saat antara objek sipil dan objek militer, menyatakan bahwa objek sipil, seperti penduduk sipil, mendapat manfaat dari perlindungan umum, seperti yang diatur dalam Pasal 52. Berdasarkan Pasal 52 Protokol Tambahan I tahun 1977, telah ditentukan apa yang dimaksudkan dengan objek sipil dan sasaran militer (Protokol Tambahan, 1977).

Dengan adanya pengaturan terhadap objek sipil yang telah diatur dalam Protokol Tambahan I 1977 ini masih belum semua terikat dan benar-benar tunduk pada peraturan ini, karena fakta di lapangan yang terjadi di dalam konflik bersenjata masih banyak objek sipil yang terkena serangan dari sasaran militer yang sehingga membuat penderitaan warga sipil semakin memburuk dalam situasi konflik bersenjata (Haryomataram, 2005).

Meskipun Pasal 85 dari Protokol I menyatakan bahwa serangan terhadap penduduk sipil atau warga sipil akan dianggap sebagai kejahatan perang, Namun, tidak ada ketentuan yang serupa pada objek-objek sipil secara umum. Selain itu walaupun kejahatan perang dianggap jika menyerang benda-benda tertentu yang diberikan perlindungan khusus, seperti karya atau instalasi yang mengandung daya kekuatan yang berbahaya, wilayah yang tidak dijaga, zona demiliterisasi, monumen bersejarah, karya seni, dan tempat ibadah. Protokol II tidak mencakup perlindungan umum untuk objek sipil; hanya beberapa objek, padahal sangat penting bagi warga sipil diberikan perlindungan khusus seperti pada unit medis dan alat transportasi karena merupakan objek yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup penduduk sipil termasuk properti kebudayaan.

Peran Jurnalis dalam Peliputan Perang

Penyajian berita mengenai konflik, permusuhan bahkan peperangan merupakan berita yang menarik bagi media karena mengandung unsur *news value*. Berita yang ada di media merupakan produk dari aktivitas yang dinamakan jurnalisme. Jurnalisme lebih berkaitan dengan kewartawanan. Jurnalisme juga diartikan sebagai suatu kegiatan mengumpulkan, memeriksa, menganalisis informasi yang diperoleh dan melaporkannya. Informasi diperoleh dari peristiwa aktual, menyangkut isu atau orang-orang yang dijadikan subjek berita. Jurnalis merupakan suatu proses yang mencakup pengumpulan, penyiapan dan menyebarkan berita melalui media massa. Berdasarkan definisi tersebut, jurnalisme dapat dijelaskan sebagai tugas seseorang yang terlibat dalam proses kebijakan kewartawanan (Wardhani, 1916).

Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (2004), mengungkapkan elemen-elemen jurnalisme yang harus dipraktikkan wartawan, antara lain (Kovach et al, 2004):

1. Kewajiban pertama jurnalis adalah pada kebenaran.
2. Loyalitas pertama jurnalis adalah kepada warga.
3. Intisari jurnalisme adalah disiplin dan verifikasi.

4. Menjaga independensi dari sumber berita.
5. Jurnalisme harus berlaku sebagai pemantau kekuasaan.
6. Jurnalisme harus menyediakan forum publik untuk kritik atau dukungan warga.
7. Jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting, menarik dan relevan.
8. Jurnalisme harus menjaga agar berita komprehensif dan proporsional.
9. Para praktisinya harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka.

Peter Arnett, seorang jurnalis veteran perang yang meliput konflik bersenjata di berbagai negara di dunia, mengatakan bahwa fungsi jurnalis dalam meliput peperangan adalah sebagai saksi yang mengemukakan apa yang dilihat dan apa yang didengarnya. Hal tersebut dilakukan oleh jurnalis agar pada peristiwa yang terjadi pada saat peperangan dapat diketahui oleh pihak-pihak di luar para pelaku dan penderita peperangan (Agung et al, 2016).

Dalam imajinasi publik, pengalaman koresponden perang dalam konflik penuh dengan aksi, kekuatan, dan adrenalin. Konflik adalah serangkaian bentrokan militer, fisik, dan ideologis. Di siang hari koresponden perang digambarkan dengan situasi di mana wajah mereka berlumuran lumpur dan di malam hari minum bersama tentara di sekitar api unggun. Juga telah diklaim bahwa dalam banyak hal, pelaporan perang lebih mudah daripada jenis jurnalisme lainnya karena aksi dalam mendorong cerita dan secara alami menarik perhatian audiens (Risso, 2017). Pelaporan perang tetap menjadi informasi penting dalam proses demokrasi. Pelaporan perang terus menjadi profesi yang sangat menantang dan sangat berbahaya. Ada kekhawatiran akan keselamatan pribadi para jurnalis selain itu masalah yang lain seperti logistik dalam mencapai zona perang, menemukan saksi, dan melaporkan kembali. Ada juga resiko di mana informasi dapat dimanipulasi oleh militer dan politisi serta disalahgunakan oleh untuk kepentingan kelompok atau pribadi.

Menjadi jurnalis perang bukanlah profesi yang mudah, banyak tantangan dan ancaman yang dihadapi bahkan nyawa menjadi taruhannya. Wartawan perang atau koresponden perang adalah jurnalis

yang meliput berita secara langsung dari zona perang. Jurnalisme dianggap menjadi "misi bunuh diri" bagi koresponden asing yang meliput di tempat seperti Suriah dan Yaman, banyak yang menjadi korban oleh faksi-faksi yang bertikai. Pada tahun 2014 kasus eksekusi jurnalis James Foley dan Steven Sotloff dari Amerika serta Kenji Goto dari Jepang merupakan sekian dari banyak kasus yang paling terkenal dari banyaknya wartawan asing yang diculik dan dibunuh oleh ISIS di Suriah (Time, 2014). Pada tahun 2017 saja menurut Komite Perlindungan Jurnalis (Committee to Protect Journalists) sembilan wartawan Suriah tewas dalam perang (CPJ, 2019). Dalam konflik bersenjata di Suriah pada tahun 2017-2019 sebanyak 20 jurnalis menjadi korban, CPJ mengonfirmasi sebanyak 15 jurnalis tewas dalam baku tembak dan 3 orang yang terbunuh (CPJ, 2019). Fakta tersebut merupakan cerminan adanya ketidaksesuaian antara penegakan aturan dalam Hukum Humaniter Internasional sebagai instrumen perlindungan jurnalis ketika bertugas dalam misi profesional di area konflik bersenjata di mana jurnalis mendapat status seperti warga sipil dan berhak akan perlindungan. Jurnalis asing juga kerap menjadi target dalam konflik bersenjata. Di Suriah misalnya Angkatan bersenjata Suriah yang dikomando Bashar al-Assad melancarkan serangan terhadap jurnalis asing terutama jurnalis Amerika karena nasionalitasnya. Negara-negara barat terutama Amerika Serikat diketahui mendukung adanya penggulingan rezim Assad yang dilakukan kelompok oposisi. Amerika diketahui menyediakan bantuan logistik dan memberikan pelatihan militer bagi anggota-anggota oposisi yang tergabung dalam Free Syrian Army (Wardana et al., 2016).

Terbunuhnya jurnalis dalam konflik bersenjata seolah olah menjadi hal yang tidak bisa dinafikan setiap tahunnya. Data statistik dari Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ) di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 1992 sampai 2019 sebanyak 1348 jurnalis telah terbunuh (Gambar 2) (CPJ, 2019) di Tahun 2017 sebanyak 47 jurnalis terbunuh dan pada Tahun 2018 sebanyak 54 Jurnalis yang telah terbunuh, Adapun yang dipenjara sebanyak 250 jurnalis.

Gambar 2. Statistik Jumlah Jurnalis yang terbunuh sepanjang 1992-2019

Sumber : Committee to Protect Journalist, 2019

Berbagai peristiwa yang menimpa jurnalis di wilayah konflik seperti peristiwa di atas, merupakan gambaran nyata bahwa Hukum Humaniter Internasional tidak terimplementasi seperti seharusnya. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa komunitas yang seharusnya melindungi jurnalis yang bertugas di daerah konflik tidak menunjukkan adanya unsur kemanusiaan seperti yang seharusnya diusung oleh Hukum Humaniter Internasional, hal inilah kemudian yang menjadikan upaya perlindungan jurnalis dalam konflik bersenjata seperti utopia (Jackson et al, 2013) yang percaya bahwa tiap individu memiliki niatan baik untuk mematuhi Hukum Humaniter Internasional. Padahal, realitasnya telah ada Hukum Humaniter Internasional sebagai bentuk upaya perlindungan bagi jurnalis yang berada dalam konflik bersenjata, namun belum terimplementasi seperti seharusnya.

Harapan Pada Perkembangan IHL

Lahirnya Hukum Humaniter Internasional secara filosofis disebabkan karena kesadaran terhadap arti penting nilai kemanusiaan, walaupun pada implementasinya perlindungan jurnalis dan koresponden perang masih menghadapi tantangan yang berat dalam aspek penegakan hingga saat ini. Namun, Keberadaan IHL merupakan upaya agar suatu saat kelak dengan perkembangan dunia dari masa-masa kemasa aturan-aturan mengenai IHL akan terus berkembang dan dapat terus didorong

agar seluruh pihak memahami dan mampu menghormati nilai-nilai yang terkandung dalam IHL. Hal yang paling terburuk bagi jurnalis ataupun koresponden perang bisa terjadi jika IHL tidak ada atau tidak mengatur masalah perlindungan jurnalisisme dalam konflik bersenjata tersebut, sehingga optimisme mengenai penegakan IHL perlu ditanamkan bahwa di masa mendatang IHL akan terus berkembang dan lebih baik dalam penegakannya tidak hanya bagi perlindungan Jurnalis dalam konflik bersenjata maupun subjek-subjek dan objek-objek yang juga turut diatur dan dilindungi dalam IHL.

Kesimpulan

Jurnalis independen ataupun koresponden perang sangat rentan terhadap kekerasan bahkan kematian dalam melaksanakan misi profesional mereka ketika melaporkan konflik bersenjata atau situasi kekacauan lainnya. Meskipun mereka mendapatkan serangkaian perlindungan di bawah Hukum Humaniter Internasional dan di bawah Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, namun serangan terhadap jurnalis terus berlanjut, sehingga impunitas bagi jurnalis tentu saja harus berperan dalam melindungi diri mereka dengan lebih baik.

Berbagai macam risiko yang dihadapi oleh jurnalis seperti tertangkap bahkan terbunuh di medan perang. Maka perlu diwajibkan bagi semua personel media yang dikerahkan dalam meliput suatu konflik agar diberikan pelatihan mengenai risiko di area konflik oleh lembaga atau organisasi media mereka, serta melengkapi dengan peralatan kesehatan dan pelindung keselamatan seperti paket medis, helm, respirator, dan jaket antipeluru yang suatu waktu dapat menyerang mereka. Kemudian, karena pengakuan akan meningkatnya ancaman dan bahaya yang dihadapi jurnalis dalam konflik bersenjata, sehingga isu mengenai memberikan perlindungan khusus bagi jurnalis menjadi penting. Komunitas internasional para cendekiawan hukum, praktisi, jurnalis, dan LSM media perlu memberikan berbagai usulan tentang cara melindungi jurnalis dengan lebih baik di masa depan.

Referensi

Additional Protocol to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) 1977

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1738 Tahun

2006 Agung Anugrah Sukma, Palupi Dwi Astuti, Warson Poniar, “Pengaturan Perlindungan Wartawan Perang dan Pertanggungjawaban Negara Menurut Hukum Humaniter Internasional”,

[http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFH&page=article&op=viewFile&path\[\]=3354&path\[\]=2887](http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFH&page=article&op=viewFile&path[]=3354&path[]=2887), di akses 23 Juli 2019.

Ambarwati, et. all., 2010, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan, Internasional*, Rajawali Pres : Jakarta.

Balguy-Gallois, Alexandre, “The Protection Of Journalists And News Media Personnel In Armed Conflict”, *International Review of the Red Cross*, Vol. 86, No. 853, March 2004, pp. 37-67.

Committee to Protect Journalist (CPJ), “9 Journalists Killed In Syria” https://cpj.org/data/killed/2019/?status=killed&motiveconfirmed%5b%5d=confirmed&type%5b%5d=journalist&cc_fips%5b%5d=sy&start_year=2017&end_year=2017&group_by=location, diakses 1 Agustus 2019.

Committee to Protect Journalist (CPJ), “20 Journalists Killed In Syria”, https://cpj.org/data/killed/2019/?status=killed&motiveconfirmed%5b%5d=confirmed&type%5b%5d=journalist&cc_fips%5b%5d=sy&start_year=2017&end_year=2019&group_by=location, diakses 1 Agustus 2019

Committee to Protect Journalist (CPJ), “1348 Journalists Killed between 1992 and 2019 / Motive Confirmed”, <https://cpj.org/data/killed/?status=Killed&motiveConfirmed%5B%5D>

[5D=Confirmed&type%5B%5D=Journalist&start_year=1992&end_year=2019&group_by=year](https://cpj.org/2012/02/attacks-on-the-press-in-2011-egypt.php), diakses 1 Agustus 2019

Committee to Protect Journalist (CPJ), “Attacks on The Press in 2011”, <https://cpj.org/2012/02/attacks-on-the-press-in-2011-egypt.php>, diakses pada 30 Juli 2019

CPJ, “Attacks on The Press in 2011”, <https://cpj.org/2012/02/attacks-on-the-press-in-2011-libya.php>, diakses pada 30 Juli 2019

Committee to Protect Journalist (CPJ), “54 Journalists Killed in 2018 / Motive Confirmed” https://cpj.org/data/killed/2019/?status=Killed&motiveConfirmed%5B%5D=Confirmed&type%5B%5D=Journalist&start_year=2018&end_year=2018&group_by=location, diakses 25 Juli 2019

Düsterhöft, Isabel, 2013, The Protection of Journalists in Armed Conflicts: How Can They Be Better Safeguarded?, *Utrecht Journal of International and European Law*, ISSN 0927-460X.

Geneva Convention (III) Relative to the Treatment of Prisoners of War 1949

Geneva Convention (IV) Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War 1949

Haryomataram, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

ICRC, “Interview: How does International Humanitarian Law Protect Journalists in Armed-Conflict Situations?” (ICRC, 27 July 2010), <https://www.icrc.org/eng/resources/documents/interview/protection-journalists-interview-270710.htm>, diakses 27 Juli 2019.

Jackson & Sorensen, 2013, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*, Oxford University Press, United Kingdom.

Kovach, Bill, Tom Rosenstiel. 2004. Terjemahan. *Elemen-Elemen Jurnalisme, Apa yang Seharusnya Diketahui Wartawan dan Diharapkan Publik*. ISAI, Jakarta.

Our World in Data, “War and Peace”, <https://ourworldindata.org/war-and-peace>, diakses 27 Juli 2019.

- Permanasari Arlina, et. all., 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta.
- Risso, Linda, “Reporting From The Front: First-Hand Experiences, Dilemmas And Open Questions” *Media, War & Conflict*, Vol. 10(1) 59 –68. 2017
- Rudy M Teuku, 2011, *Hukum Internasional 2*, *Hukum Internasional 2*, PT Refika Aditama, Bandung
- Sujatmoko Andrey, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Rajawali Press, Jakarta.
- SIPRI, “Armed Conflict Data Trends”
<https://www.sipri.org/yearbook/2016/06>, diakses 25 Juli 2019
- SIPRI, “Armed Conflicts and Peace Processes” ,
<https://www.sipri.org/yearbook/2018/02>, diakses 25 Juli 2019.
- Time, *ISIS Video Shows Killing of Second American Journalist*, September 2, 2014, <https://time.com/3258167/steven-sotloff-isis-video-james-foley/>, diakses 23 Agustus 2019
- Tuosto K, “The ‘Grunt Truth’ of Embedded Journalism: The New Media/Military Relationship” (2008) Vol X *Stanford Journal of International Relations*.
- Wardana Afifah Khansadhia, Setiyono Joko, Hardiwinoto Soekotjo, “Relevansi Hukum Humaniter Internasional Terhadap Perlindungan Jurnalis Di Medan Perang (Studi Kasus Eksekusi Jurnalis Amerika James Foley dalam Konflik Bersenjata Di Suriah)”, *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.
- Wardhani, Andy Corry, “Jurnalisme Perang Dan Kontribusi Jurnalisme Alternatif Untuk Perdamaian” ,
<http://digilib.unila.ac.id/1916/1/jurnalisme%20perang-andy%20corry%20w.pdf>, diakses 22 juli 2019